



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 April 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HANI SYOPIAR RUSTAM
2. Jabatan : SEKRETARIS DITJEN
3. NHK : 487079

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 4.015.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 268 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 47 m2/47 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 14 m2/14 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 14 m2/14 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m2/24 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 35 m2/35 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 430.600.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOBIL, TOYOTA CAMRY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000



3. MOTOR, E-MOTO SEPEDA MOTOR LISTRIK Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 600.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	149.450.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.410.799.805
F. HARTA LAINNYA	Rp.	180.000.000
Sub Total	Rp.	6.185.849.805
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.185.849.805

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.